

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman sosial yang khas. Kekhasan sosial negara Indonesia tersebut terlihat dari berbagai aspek baik ras, etnis, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadatnya. Semua keragaman tersebut tumbuh subur diberbagai penjuru negeri. Kondisi sosial yang beragam justru menjadi modal dasar terciptanya semangat persatuan antar masyarakat Indonesia. Semangat persatuan tersebut dibuktikan dengan adanya kebulatan tekad untuk berjuang bersama memerdekakan Indonesia dari kolonialisme asing. Perjuangan tersebut dilakukan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial tertentu. Catatan sejarah ini menjadi sebuah bukti bahwa keragaman ternyata memiliki dampak positif dalam membangun peradaban di Indonesia.

Semangat persatuan dalam sebuah entitas bangsa sebenarnya baru dimulai ketika peristiwa sumpah pemuda berlangsung. Peristiwa yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1928 tersebut menjadi babak baru sejarah persatuan di Nusantara. Peristiwa yang diikuti oleh para pemuda dari berbagai penjuru negeri tersebut bertujuan untuk menyatukan keragaman yang ada. Tekad mulia para pemuda Indonesia ini tertuang melalui ikrar “sumpah pemuda” yang didalamnya memuat 3 poin yaitu (1) pengakuan terhadap tumpah darah yang satu tanah air Indonesia, (2) pengakuan atas bahasa yang satu bahasa Indonesia, dan (3) pengakuan sebagai bangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga semangat ini menjadi semboyan sekaligus identitas khas yang melekat pada diri bangsa Indonesia.

Identitas sosial masyarakat Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan juga tertuang dari semboyan Bhineka Tunggal Ika. Semboyan yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu menjadipenegasan bahwa masyarakat Indonesia mampu hidup bersama dalam ragam perbedaan. Namun demikian, perlu disadari bahwa keragaman seperti dua sisi mata pisau yang saling berlawanan satu sama lain. Keragaman disatu sisi memiliki dampak positif namun disisi lain juga

berdampak negatif. Semangat persatuan antar masyarakat menjadi catatan positif dari keragaman. Keragaman ternyata menjadi dasar munculnya benih-benih konflik seperti diungkapkan oleh Arif (2008) pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Dampak Kebhinekaan di Indonesia

Unsur Kebhinekaan	Dampak Positif	Negatif
Ras, etnis, agama, budaya, bahasa, dan lainnya	1) Media pemersatu antar elemen bangsa dalam melawan kolonialisme penjajah 2) Upaya untuk mewujudkan tujuan bersama	1) Pemicu munculnya konflik sosial 2) Terganggunya ketidakstabilan keamanan, sosial ekonomi, politik di masyarakat

Sumber: Arif (2008)

Mengacu tabel 1.1 di atas terlihat bahwa kebhinekaan memunculkan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Kebhinekaan merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan nyata bagi masyarakat Indonesia. Kebhinekaan ternyata dapat dijadikan ajang pembenaran munculnya konflik horizontal di masyarakat baik dalam bidang keamanan, sosio ekonomi, maupun politik. Clifford Geertz seorang antropolog asal Amerika Serikat bahkan telah meneliti keberagaman di Negara multietnis dan mayoritas Islam seperti Indonesia dan Maroko. Geertz (1996) telah menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi pusat berkembangnya pertungan multidimensi dan idologi. Hal ini terlihat dari tumbuh dan berkembangnya pengaruh (1) Asiatik seperti India dengan Hindhu-Buddha China dengan Konfusianismenya, Timur Tengah dengan Islamnya; (2) Eropa seperti Portugis, Inggris, dan Belanda dengan Kristenisasi dan kapitalisme.

Tujuh puluh tiga tahun pasca merdeka bagaimanakah dengan semangat *kebhinekaan* di Indonesia? Seiring dengan berkembangnya waktu semua hal tentu akan mengalami perubahan baik dalam konteks individu, kelompok, termasuk negara. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menjaga dan merawat kebhinekaan akan semakin sulit dengan beban masalah yang semakin kompleks. Konflik horizontal seperti anarkisme,

separatisme, tetorisme, tawuran, konflik etnis maupun agama menjadi masalah-masalah sosial yang mengiringitujuh puluh tiga tahun kemerdekaan Indonesia. Masalah sosial tersebut dapat terjadi pada berbagai wilayah di Indonesia. Corak keberagaman yang ada akan terus menjadi ancaman nyata dalam mewujudkan integrasi di negeri ini. Kondisi ini dapat di lihat dari munculnya konflik etnisitas di berapa wilayah di Indonesia.

Satu diantara beberapa propinsi yang cukup punya potensi besar terjadinya konflik etnitas adalah Kalimantan Barat. Data BPS tahun 2016 menyebutkan bahwa 34.94% Etnis Dayak, 33.84% Melayu, 9.74 Jawa, 8.17 Tionghoa, 6.27% Madura, 3.13% Bugis, 0.60% Batak, 0.50% Dayak, 0.33% Banjar, dan 1.33% lainnya. Keragaman etnis di Kalimantan Barat adalah sebuah modal yang dapat digunakan untuk menumbuhkan rasa integrasi atau mempererat hubungan antar kelompok masyarakat yang beragam tersebut. Kondisi ini sendiri sesuai dengan misi yang terkandung dalam Pancasila poin kelima yang didalamnya dengan tegas menjelaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna keadilan dalam konteks ini sangat luas tidak hanya dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, bahkan semua aspek strategis penunjang kehidupan manusia itu sendiri.

Keragaman etnis ternyata juga dapat mengancam semangat kebhinekaan di Indonesia. Kalimantan Barat sebagai *role* model daerah multikultural di Indonesia pun tidak dapat lepas dari konflik antar warganya. Zasco (2011) menjelaskan ada setidaknya 14 peristiwa konflik di Kalimantan Barat yang melibatkan etnis (1) Tionghoa vs Dayak tahun 1967; (2) Madura vs Dayak sejak tahun 1962, 1963, 1968, 1972, 1976, 1977, 1979, 1983, 1993, 1994, dan 1996-1997; (3) Madura vs Melayu tahun 1998 dan 1999. Jika dikaji berdasarkan tempat terjadinya maka 14 peristiwa konflik tersebut tersebar di beberapa daerah berikut:

Tabel 1.2 Konflik antar Etnis di Kalimantan Barat

No	Tahun	Konflik Etnis	Lokasi Pemicu Kejadian
1	1950	Madura vs Dayak	Samalantan (Kabupaten Bengkayang)
2	1967	Madura vs Dayak	Terap toho (Kabupaten Pontianak)
3	1968	Madura vs Dayak	Sungai Pinyuh (Kabupaten Pontianak)
4	1976	Madura vs Dayak	Kabupaten Pontianak
5	1977	Madura vs Dayak	Samalantan (Kabupaten Bengkayang)

6	1979	Madura vs Dayak	Samalantan (Kabupaten Bengkayang)
7	1983	Madura vs Dayak	Sungai Ambawang (Kabupaten Pontianak)
8	1993	Madura vs Dayak	Kota Pontianak
9	1994	Madura vs Dayak	Umbang Titi
10	96-96	Madura vs Dayak	Sangau Ledo (Bengkayang)
11	1997	Madura vs Dayak	Kota Pontianak
12	1999	Madura vs Melayu	Parit Setia (Kabupaten Sambas)
13	1999	Madura vs Dayak	Samalantan dan Sanggau Ledo
14	2000	Madura vs Melayu	Kota Pontianak

Sumber: Sarwono, (2002: 73)

Pada dasarnya literatur tentang jumlah peristiwa konflik di Kalimantan Barat terdapat perbedaan satu sama lain. Perbedaan terjadi karena pengambilan tahun awal terjadinya konflik. Hal ini terlihat dari data *United Nations Support Facility for Indonesia Recovery* atau UNSFIR (2004) dimana sejak tahun 1995-2003 terjadi 74 kali peristiwa konflik. Konflik terdahsyat terjadi di tahun (1) 1999 sebanyak 28 kali dengan kerugian 481 terbunuh, 180 terluka, 942 rumah hancur, dan 7 buah bangunan public hancur; (2) 1997 sebanyak 17 kali dengan kerugian 1.004 orang terbunuh, 356 terluka, 2.406 rumah hancur, dan 6 bangunan publik hancur; dan (3) 2000 sebanyak 10 kali dengan kerugian 8 orang terbunuh, 46 terluka, 9 rumah hancur, dan 5 bangunan publik hancur.

Konflik horizontal di Kalimantan Barat dapat dikaji berdasarkan kategori konflik. UNSFIR (2004) menyebut ada sembilan kategori konflik yang terjadi di Kalimantan Barat dimana kebanyakan konflik bersifat *ethno communal*. Konflik ini melibatkan Etnis Dayak dan Madura serta Melayu dan Madura. Konflik antar etnis Dayak dan Madura terjadi sebanyak 28 kali dimana 453 orang terbunuh, 109 terluka, 969 rumah hancur, dan 6 bangunan publik hancur. Konflik kedua antara Etnis Melayu dan Madura yaitu terjadi sebanyak 19 kali dengan 1.098 orang terbunuh, 441 terluka, 2.724 rumah hancur, dan 6 bangunan publik hancur yaitu:

Tabel 1.3 Kategori Konflik Sosial di Kalimantan Barat (1995-2003)

No	Kategori Konflik	Frekuensi Kejadian	Jumlah Terbunuh	Jumlah Terluka	Rumah Hancur	Bangunan Publik Hancur
1	Hubungan Industrial	1	0	0	0	1
2	Sumber Daya Alam	6	0	15	0	8
3	<i>Ethno-Communal</i>	19	1098	441	2724	6

	(Madura dan Dayak)					
4	<i>Ethno-Communal</i> (Madura dan Melayu)	28	453	109	969	6
5	Antar Aparatur Negara	2	5	15	0	1
6	Parpol dan Faksi	5	0	8	0	2
7	Perkelahian antar warga dan kampong	7	1	10	0	0
8	Negara dan Masyarakat	9	6	43	0	9
9	Pengadilan Massa	1	1	0	0	1
Total		78	1564	641	3693	34

Sumber: UNSFIR: 2004

Konflik horizontal di Kalimantan Barat juga dikaji berdasarkan wilayah administrasinya. Mengacu data UNSFIR (2004) diketahui ada tujuh kabupaten atau kota di Kalimantan Barat yang terkena dampak langsung konflik. Mengacu pada frekuensi terjadinya diketahui bahwa Kota Pontianak adalah wilayah yang paling sering konflik yaitu 21 kali dengan 15 orang terbunuh, 70 terluka, 29 rumah hancur, dan 7 bangunan publik hancur. Bengkayang mengalami konflik sebanyak 19 kali dengan 132 orang terbunuh, 168 terluka, 1.572 rumah hancur, dan 1 bangunan publik hancur. Daerah lain yang juga mengalami konflik adalah Sambas sebanyak 16 kali dengan 428 orang terbunuh, 48 terluka, 863 rumah hancur, dan 5 bangunan publik hancur seperti berikut:

Tabel 1.4 Konflik Sosial Berdasarkan Wilayah Administratif (1995-2003)

No	Kategori Konflik	Frekuensi Kejadian	Jumlah Terbunuh	Jumlah Terluka	Rumah Hancur	Bangunan Publik Hancur
1	Bengkayang	19	132	168	1572	1
2	Kapuas Hulu	3	1	1	0	3
3	Ketapang	2	0	4	0	1
3	Kota Pontianak	21	15	70	28	7
4	Landak	4	455	265	789	3
5	Pontianak	8	425	63	25	2
6	Sambas	16	428	48	863	5
7	Sangau	5	59	22	416	7
Jumlah		78	1515	641	3693	29

Sumber: (UNSFIR: 2004)

Mengacu pada tabel 1.4 di atas diketahui bahwa Sambas adalah salah satu daerah yang pernah mengalami konflik entisitas. Konflik di Sambas antar dua kelompok yaitu pribumi dan pendatang. Kelompok pribumi

diwakili oleh Etnis Dayak dan Melayu dan pendatang adalah Etnis Madura. Kabupaten Sambas dulunya memiliki wilayah yang sangat luas mencakup Sambas, Singkawang, serta Bengkayang. Dulu Singkawang adalah kota administratif dari Kabupaten Sambas sesuai PP No 49 Tahun 1981 dan Bengkayang adalah salah satu kecamatannya. Singkawang menjadi kota baru sesuai dengan UU No 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang. Bengkayang pun mekar dengan keluarnya UU Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang.

Konflik di Kabupaten Sambas menyiratkan banyak cerita. Konflik antara Etnis Madura dan Melayu yang terjadi pada tahun 1999 misalnya. Konflik kedua etnis ini ternyata dipicu oleh adanya peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh orang Madura terhadap Melayu (Ulum, 2013: 26). Pasca konflik Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak dijadikan sebagai tempat pengungsian untuk kurang lebih 48.000 jiwa. Ironisnya pada tahun 2000-2002 konflik antar kedua etnis pun pecah kembali baik di Kota Pontianak maupun Kabupaten Pontianak (Subro, 2011: 20). Pada perkembangannya Kabupaten Pontianak mengalami pergantian nama menjadi Kubu Raya.

Setiap peristiwa konflik yang terjadi di masyarakat harus harus diimbangi dengan adanya tindakan resolusi konflik. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan relokasi terutama pada korban konflik Sambas dilakukan di Dusun Parit Madani, Tebang Kacang, Sei Raya Kabupaten Kubu Raya. Namun upaya relokasi tersebut dinilai tepat dan tidak tepat sasaran. Relokasi tepat sasaran terjadi di dua lokasi yaitu SP 1 dan Bakti Suci 2 dan yang tidak tepat sasaran ada di SP 2, SP 3, dan Bakti Suci 1 seperti berikut:

Tabel 1.5 Program Relokasi di Kubu Raya

No	Nama Lokasi	Daya Tampung	Jumlah Rumah	Tahun	Pola
1	SP 1	500	500	1999	Pertanian
2	SP 2	500	420	2000	Pertanian
3	SP 3	380	380	2001	Non-Pertanian
4	Bakti Suci 1	375	350	2001	Non-Pertanian
5	Bakti Suci 2	200	200	2002	Non-Pertanian

Sumber: (Ulum, 2013: 34)

Upaya relokasi pasca konflik ternyata dilakukan juga di daerah lainnya. Hal ini terlihat dengan ditemukannya perkampungan etnis Madura yang berada di Dusun Marhaban, Sedau, Kota Singkawang (Suprpto, 2018: 15). Relokasi Etnis Madura di Marhaban terbilang unik. Keunikan ini dapat dilihat dari posisi dusun yang ternyata ada di dalam hutan. Jalan sebelum masuk ke Marhaban pun telah dijaga oleh tentara. Ada Rindam yang merupakan markas tentara terbesar di Singkawang dengan fungsi utama saat itu adalah sebagai pelindung orang-orang Madura di Marhaban. Secara kultural terlihat bahwa Etnis Madura di Marhaban tidak tercerabut dari habit mereka sebagai seorang petani.

Dua puluh tahun pasca konflik di Kabupaten Sambas yang melibatkan tiga etnis baik Madura, Dayak, dan Melayu lalu bagaimana kondisi Singkawang saat ini? Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saat ini kondisi sosial masyarakat di Kota Singkawang sudah berangsur membaik. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat Singkawang untuk meminimalisir potensi konflik. Pola interaksi terbuka antar berbagai lapisan masyarakat menjadi dasar terjadi pembauran antar etnis melalui kegiatan kawin campur. Kondisi ini diperkuat juga oleh kehadiran organisasi masyarakat seperti Persatuan Masyarakat Singkawang dan Sekitarnya (Permasis) dan Ikatan Biak Kreatif Singkawang (IKBS) dimana anggota berasal dari berbagai lapisan sosial di Singkawang.

Kesadaran sosial untuk mencegah munculnya benih-benih konflik juga terus diupayakan melalui pendekatan *top down*. Pemerintah Kota Singkawang telah mencanangkan misi “Harmoni dalam keragaman agama, etnis, dan budaya”. Misi ini diperkuat melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sesuai Permendagri No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Tujuan FPK adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam membina keamanan dan ketertiban warga dari kemungkinan timbulnya konflik sosial. FPK sendiri setidaknya membawahi 17 paguyuban etnis di Singkawang. Pemerintah Kota Singkawang juga membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

Negeri No. 8 dan 9 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah. Tujuan FKUB adalah meningkatkan kualitas toleransi, keharmonisan, saling percaya dan saling pengertian antar umat beragama. Upaya resolusi konflik di Singkawang jika konflik bernuansa etnis dibawa ke forum FPK dan jika konflik bernuansa agama dibawa ke forum FKUB. Kedua jenis konflik ini selanjutnya selesai melalui jalur musyawarah antar pihak yang berkonflik.

Pola penyelesaian konflik melalui jalur musyawarah juga dilakukan oleh di daerah seperti Kabupaten Ketapang. Asriati & Bahari (2010) melakukan kajian di Kabupaten Ketapang pada Etnis Dayak, Melayu, dan Madura. Hasil dari kajian ditemukan bahwa modal sosial antar etnis dapat dilakukan melalui adat. Adat dalam konteks Etnis Melayu dan Madura disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Penyelesaian konflik keduanya dapat dilakukan dengan cara musyawarah. Hal berbeda terjadi dengan Etnis Dayak di wilayah administrasi hukum adat Dayak. Konflik yang menimbulkan korban jiwa harus diselesaikan dengan hukum Dayak. Namun, penyelesaian konflik antar etnis di Ketapang juga turut melibatkan oknum polisi. Upaya tersebut dilakukan agar konflik yang terjadi di masyarakat dapat di cegah sedini mungkin sehingga tidak meluas ke daerah lainnya.

Mencermati praktik resolusi konflik yang ada di Kota Singkawang termasuk Kabupaten Ketapang ternyata lebih fokus ke masyarakat. Padahal tindakan serupa penting diajarkan, dilatih, dan diinternalisasikan di sekolah karena konflik pun ternyata dapat terjadi di ranah ini. Hatta (2016: 48) menyebut adanya sindrom *Post-Traumatic Stress Disorder* atau PTSD seperti munculnya perasaan marah, stres akibat kedukaan yang dalam, kekecewaan dan kegelisahan, ketakutan yang berlebihan, dan lainnya ditemui pada daerah yang pernah mengalami konflik terbuka seperti Kalimantan Barat. Mengacu pada fakta tersebut bukan tidak mungkin jika konflik serupa dapat muncul di tahun 2020an ini. Pemicu dari munculnya konflik tersebut dapat dilakukan oleh berbagai oknum termasuk siswa di

sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan pendidikan yang berorientasi untuk menyiapkan generasi muda yang cinta damai.

Upaya mempersiapkan generasi yang cinta damai tersebut dapat dilakukan pada daerah yang masyarakatnya memiliki rasa toleransi yang tinggi. Merujuk pada hasil survey SETARA Institute (2018) dijelaskan bahwa diantaranya daerah multietnis ternyata Kota Singkawang yang menyandang predikat sebagai Kota Tertoleran di Indonesia. Predikat tersebut disematkan karena masyarakatnya dapat hidup rukun, membaur, dan mampu meredam potensi konflik di masyarakat. Oleh sebab itu, sangat relevan jika sekolah di Kota Singkawang ini dijadikan sebagai percontohan untuk menerapkan pendidikan resolusi konflik.

Urgensi dari penerapan pendidikan resolusi konflik nyatanya juga diperkuat oleh berbagai persoalan kompleks didalamnya. Suryowati (2018) misalnya merilis hasil penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang kasus intoleransi di SMA di Singkawang dan Salatiga seperti berikut:

“(1) 57,5% mengaku sangat setuju untuk memberikan ucapan hari raya kepada teman sekolah yang berbeda agama, (2) 42,5% mengaku tidak setuju OSIS diketuai siswa dari agama mayoritas, (3) 34,8% mengaku tidak setuju kenyamanan dipimpin oleh seseorang dengan agama yang sama”

Mengacu hasil riset Kemendikbud di atas terlihat bahwa intoleransi sudah mulai muncul pada daerah-daerah khususnya yang multi etnis. Hasil penelitian ini harus disikapi serius oleh semua pihak karena tanda-tanda intoleransi adalah alarm berbahaya yang dapat mengancam semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Studi dari Kemendikbud tersebut di atas diperkuat oleh hasil survey peneliti. Survey yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan pada 100 responden yang dipilih secara acak di SMP Kota Singkawang menunjukkan fakta yang mengejutkan. Studi ini memperlihatkan adanya kerentanan konflik yang dialami siswa di lingkup kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat umum. Namun pada kajian ini hanya akan mengkaji fenomena konflik di sekolah. Hasil studi menunjukkan

bahwa: (1) 100% pernah melihat, mendengar, atau mengalami konflik di sekolah, (2) 42% penyebab konflik karena beda kepentingan. (3) 85% konflik terjadi antar teman sekelas, (4) 55% wujud konflik tersebut adalah dengan saling ejek. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik masih menjadi salah satu masalah laten yang cukup mengkhawatirkan di sektor pendidikan.

Hasil survei peneliti di atas relevan dengan data konflik nasional. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. KPAI mencatat 84% siswa di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah, 40% mengalami kekerasan fisik dimana pelakunya berusia antara 13-15 tahun, 75% pernah menjadi pelaku kekerasan, 50% pernah di *bully* (Hilmi, 2018). Pada tri semester pertama 2018 KPAI mencatat ada 72% pengaduan karena kekerasan fisik dan anak korban kebijakan, 9% kekerasan psikis, 4% pemalakan, dan 2% seksual. Rentetan kasus kekerasan di dunia pendidikan ini menjadi alarm berbahaya bagi kelangsungan bangsa Indonesia kedepannya.

Persoalan tindak kekerasan di lingkup pendidikan menjadi semakin pelik seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Keberadaan teknologi semakin memudahkan segala aktivitas manusia namun disatu sisi juga akan turut memudahkan peran dari manusia tersebut. Kondisi ini terlihat nyata jika dikaitkan dengan keberadaan generasi Alpha (2010 ke atas) yang sudah terkontaminasi oleh teknologi bahkan sebelum mereka dilahirkan. Reis (2017) menyebut jika Generasi Alpha sulit dipisahkan dari teknologi. Oleh sebab itu, muncul pameo “dilahirkan manusia dan didik oleh teknologi”. Penelitian Novarianti, Hukmi, & Ilga (2019: 65) menyebut 21,3% Generasi Alpha sering menggunakan *gadget*, 51,1% kadang-kadang, dan 12,8% hampir tidak pernah menghabiskan waktu lebih dari 10 jam sehari. Celaknya tidak semua informasi yang ada saat ini positif karena bisa jadi ada muatan *hoaks* didalamnya. Penelitian MIT Media Lab menyebut bahwa 70% cuitan *hoak* lebih sering dicuit ulang ketimbang berita benar (Shantika, 2018). Kondisi ini terkandung membuat

publik gaduh sehingga menyebabkan terjadinya gejolak sosial di masyarakat.

Gejolak sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan di lingkup pendidikan jika terus dibiarkan berlarut-larut dapat menjadi ancaman yang nyata bagi bangsa Indonesia kedepannya. Lickona (1991) pernah menyebut ada sepuluh tanda kegagalan suatu negara sebagai berikut:

- (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk, (3) pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindak kekerasan, (4) meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas, (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, (6) menurunnya etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, (8) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, (9) membudayanya ketidakjujuran, serta (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama.

Pada dasarnya sepuluh masalah di atas ternyata sudah tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sepuluh masalah tersebut jika dikaitkan dengan persoalan disintegrasi akan nampak pada ciri nomor 3, 5, 7, 8, dan 10. Ada lima item yang menjadi acuan menyikapi permasalahan disintegrasi di Indonesia. Lima ciri ini cukup mengkhawatirkan karena setengah dari indikator kegagalan sudah turut mengancam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Mencermati permasalahan yang ada maka semua elemen masyarakat harus saling bahu-membahu dan bergandengan tangan bersama untuk memutus mata rantai konflik. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan kembali mengoptimalkan sektor pendidikan. Pendidikan memegang peran penting bagi pembangunan suatu negara. Negara-negara di Benua Afrika yang menyelesaikan konflik melalui jalur kekerasan cenderung tertinggal dibandingkan dengan Jepang misalnya yang lebih menonjolkan pendidikan bagi warganya (Muslich, 2011: 2). Mengacu pendapat Muslich ini terlihat bahwa fenomena konflik etnisitas di Kalimantan Barat adalah mirip dengan budaya kekerasan yang terjadi di Afrika. Oleh sebab itu, paradigma tersebut harus diganti dengan cara-cara bermartabat sebagai perwujudan majunya peradaban Indonesia. Upaya untuk merealisasikan hal ini terjadi pada tahun

1962 saat Presiden Soekarno meresmikan kegiatan *Asia Games* ke IV melalui semangat *nation and character building*

Implementasi dari semangat *nation and character building* tersebut harus tetap bermuara pada sosok pemuda. Pemuda memang memiliki posisi tawar yang penting bagi pembangunan suatu negara. Ir. Soekarno bahkan pernah membuat pernyataan menarik tentang pemuda. Pernyataan tersebut berbunyi “Beri aku 1.000 orang tua niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda niscaya akan ku guncang dunia”. Mengacu pada pernyataan Ir. Soekarno tersebut maka sudah sepantasnya pemuda diberikan porsi lebih untuk turut berkontribusi dalam pembangunan peradaban negeri. Peradaban tersebut harus bermuara pada upaya mewujudkan harmonisasi dalam bingkai keragaman.

Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) nyatanya tidak tinggal diam. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pendidikan. Permendikbud ini bertujuan menciptakan kondisi pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan menghindarkan semua warga sekolah dari unsur tindak kekerasan. Peraturan Permendikbud ini diharapkan mampu berkontribusi untuk meminimalisasi konflik di dunia pendidikan. Namun, peraturan tetaplh peraturan yang seolah tidak berimplikasi langsung dengan kondisi di lapangan. Kasus kekerasan baik psikis maupun fisik oleh warga sekolah bahkan oleh orang tua siswa pun masih tetap berlangsung hingga detik ini.

Upaya meminimalisasi kasus kekerasan di sekolah dapat dilakukan dengan menginternalisasikan pendidikan resolusi konflik. Internalisasi tersebut didukung oleh tiga aspek (1) alamiah dimana setiap individu selalu belajar dari semua hal yang didapatnya melalui panca indra mereka terutama yang berkaitan dengan cara pemecahan dan penguraian konflik; (2) medium dimana setiap fenomena konflik menarik untuk pelajari karena memiliki metode yang jelas, sistematis, dan juga aplikatif; (3) institusi pendidikan untuk membentuk individu yang berkarakter. Mengacu pada pendapat ini

terlihat begitu pentingnya menerapkan pendidikan resolusi konflik di sekolah.

Sekolah memiliki peranan strategis untuk meminimalisasi potensi konflik terutama di daerah multietnis seperti Kota Singkawang. Hasil wawancara yang dilakukan pada Desember 2018 tahun lalu di empat sekolah monoetnis yaitu SMP Barito (Tionghoa), SMPN 15 Bagak Sahwa (Dayak), MTs Ushuluddin (Melayu) serta MTs Makarim El-Ahklaq (Madura) menunjukkan perlunya memasukkan muatan pendidikan resolusi konflik dalam pembelajaran. Secara umum semua guru sekolah sepatutnya untuk memasukkan resolusi konflik dalam pembelajaran. Rasa traumatik akibat konflik etnisitas menjadi alasan utamanya. Para guru IPS berharap bahwa pendidikan resolusi konflik dapat menjadi solusi alternatif untuk meminimalisasi konflik antar etnis di Kalimantan Barat khususnya Singkawang.

Secara spesifik upaya untuk meminimalisasi konflik antar etnis tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan model resolusi konflik. Samuel (2015) menjelaskan pengembangan model resolusi konflik berbasis budaya *Pela* tepat diterapkan pada masyarakat multi etnis di Kota Ambon. Budaya *Pela* yang ada pada masyarakat Ambon ternyata mampu menyatukan antar etnis yang pernah konflik. Namun, Budaya *Pela* tersebut hanya ada di tataran masyarakat belum dioptimalkan dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, Samuel mencoba untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang melekat pada Budaya *Pela* menjadi sebuah model pembelajaran resolusi konflik. Nilai-nilai yang melekat pada Budaya *Pela* tersebut diaplikasikan dalam pembelajaran IPS untuk menyatukan siswa dari berbagai latar belakang baik etnis maupun agama dalam konteks pendidikan.

Upaya untuk meminimalisasi konflik juga dilakukan oleh Maftuh. Maftuh (2005) yang melakukan penelitian di Kota Bandung juga mengembangkan model resolusi konflik di tingkat SMA. Pengembangan ini selain menghasilkan model juga menemukan fakta yang cukup menarik. Model resolusi konflik ternyata turut berperan untuk mengembangkan

keterampilan resolusi konflik siswa secara komprehensif baik pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penelitian oleh Maftuh ini ternyata juga dilakukan pada dua mata pelajaran sekaligus yaitu kewarganegaraan dan IPS. Keberadaan penelitian ini akan memberikan masukan yang positif dalam mengembangkan model resolusi konflik di sekolah.

Dua penelitian pengembangan baik yang dilakukan oleh Samuel maupun Maftuh sangat menginspirasi peneliti. Penulis akhirnya memutuskan untuk turut berkontribusi meminimalisasi potensi konflik khususnya di Singkawang dengan cara mengembangkan model resolusi konflik. Pengembangan ini penting untuk dilakukan jika mengingat sejarah kelam konflik pernah terjadi di Singkawang. Masyarakat Singkawang harus bangkit dan bersatu dalam bingkai keragaman. Pengembangan model resolusi ini bertujuan untuk memperkuat integrasi antar etnis di Kota Singkawang melalui mata pelajaran IPS. IPS peneliti anggap penting karena mampu menyajikan materi secara kompleks dari berbagai disiplin ilmu relevan (NCSS, 1994). Selain itu, peneliti sepakat dengan pernyataan Einstein bahwa kegagalan dalam pembelajaran IPS (politik dan sejenisnya) akan dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara (Zamroni, 2011).

Mengacu pada pemaparan di atas dapat identifikasi beberapa masalah yang dapat dijadikan sebagai dasar pentingnya mengembangkan model resolusi konflik (MRK) untuk memperkuat integrasi antar etnis (IAE) di Kota Singkawang. Ada setidaknya tujuh poin yaitu (1) tingginya potensi konflik di Kalimantan Barat, (2) pentingnya menjaga integrasi suatu bangsa, (3) tingginya angka kekerasan di sekolah, (4) ancaman teknologi bagi generasi muda, (5) perlunya menanamkan *nation and character building*, (6) pentingnya membangun kemampuan resolusi konflik, dan (7) pentingnya mengembangkan model resolusi konflik. Ketujuh poin tersebut menjadi beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran konflik yang terjadi di masyarakat Kota Singkawang serta tindakan resolusi konflik yang telah dilakukan sebagai sumber belajar IPS?
2. Bagaimanakah pengembangan model resolusi konflik dalam pembelajaran IPS untuk memperkuat integrasi antar etnis di Kota Singkawang?
3. Bagaimanakah efektivitas model resolusi konflik dalam pembelajaran IPS berkontribusi untuk memperkuat integrasi antar etnis di Kota Singkawang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan gambaran konflik yang terjadi di masyarakat Kota Singkawang serta tindakan resolusi yang telah dilakukan sebagai sumber belajar IPS
2. Menjelaskan pengembangan model resolusi konflik dalam pembelajaran IPS untuk memperkuat integrasi antar etnis di Kota Singkawang
3. Menjelaskan efektivitas model resolusi konflik dalam pembelajaran IPS berkontribusi untuk memperkuat integrasi antar etnis di Kota Singkawang

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang model pembelajaran yang secara spesifik mengkaji soal resolusi konflik. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat kondisi demografi bangsa Indonesia khususnya di Propinsi Kalimantan Barat sangat rentan mengalami konflik horizontal. Oleh sebab itu, dimulai dari sekolah siswa perlu dibekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan resolusi konflik nantinya siswa dapat tumbuh menjadi agen-agen resolusi konflik baru di kehidupan sosialnya. Hal ini dilakukan tentunya untuk meminimalisir potensi konflik dikemudian hari.

- 2 Secara kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengambil kebijakan di Dinas Pendidikan Pusat maupun Daerah untuk mengintegrasikan model MKR-IAE ke dalam kurikulum pembelajaran IPS di jenjang SMP. Selama ini praktik pengajaran IPS belum sepenuhnya fokus pada upaya untuk membekali siswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan resolusi konflik. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi guru maupun pengembang pendidikan IPS untuk memasukkan muatan pendidikan resolusi konflik dalam pembelajaran.
- 3 Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada:
 - a Peneliti, hasil penelitian dapat digunakan untuk mendapat gambaran tentang proses pengembangan model resolusi konflik (MRK) untuk memperkuat integrasi antar etnis (IAE) serta efektivitasnya pada pembelajaran IPS
 - b Guru IPS, penelitian ini diharapkan dapat menjadi modal berharga bagi guru IPS di Singkawang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk menginternalisasikan kajian resolusi konflik dalam pembelajaran IPS. Hal ini dilakukan sebagai wujud kontribusi nyata guru untuk turut terlibat dalam menyiapkan generasi muda yang cerdas, nasionalis, dan menjunjung tinggi nilai kedamaian antar sesama anak bangsa.
 - c Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi stimulus yang positif bagi sekolah untuk mampu menerapkan iklim sekolah yang toleran, cinta damai, anti kekerasan dan anti diskriminasi, serta mengedepankan budaya musyawarah sebagai upaya untuk memperkuat integrasi antar etnis yang ada di sekolah. Hal tersebut secara praktik di kelas telah diterapkan melalui kegiatan pembelajaran berbasis model MKR-IAE
 - d Calon peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk dipelajari, implementasikan, dan dikembangkan lebih lanjut. Hal ini sangat dimungkinkan karena saat ini kondisi

demografi di berbagai wilayah di Indonesia lebih heterogen. Melihat kondisi yang ada terlihat begitu besarnya peluang untuk menindaklanjuti atau mengelaborasi lebih lanjut penelitian ini.

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Kajian ini terdiri dari lima bab. Bab I adalah pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi disertasi. Bab II adalah kajian pustaka yang didalamnya berisi teori konflik, resolusi konflik, pendidikan IPS, dan integrasi antar etnis. Selain itu, pada bagian ini juga memuat tentang penelitian relevan yang dijadikan sebagai acuan melaksanakan penelitian. Bab III adalah metode penelitian yang didalamnya berisi desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, serta analisis data. Bab IV adalah temuan dan pembahasan yang didalamnya berisi hasil penelitian yang telah dilakukan dikaitkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kajian pustaka. Bab V yang berisi kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi yang didasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan.